

## BERGESERNYA POLA KONSUMSI MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK DARI MEWABAHNYA VIRUS CORONA

Oleh:

Saputra Adiwijaya<sup>1</sup>, Pipit A.Ningrum<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah

<sup>2</sup>Penyuluh pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah

Email :

<sup>1</sup>s\_adiwijaya@ymail.com, <sup>2</sup>phietningrum0205@gmail.com

### ABTSRAK:

Mewabahnya virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 telah memberi dampak baik secara global dan lokal. Tulisan ini memberikan analisis awal dalam melihat dampak COVID-19 bagi berubahnya pola konsumsi masyarakat, sehingga didapatkan sebuah ruang diskusi dalam sisi sosiologis tentang pola konsumsi masyarakat terutama di kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil observasi dan dukungan referensi yang relevan artikel ini memberikan sebuah tinjauan bahwa dampak COVID-19 memberikan perubahan pola konsumsi masyarakat selain pemenuhan kebutuhan primer juga ke pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, namun dalam beberapa bagian belum terlihat adanya pola *safety first*, justru banyak terbangun solidaritas bagi masyarakat yang terdampak.

### ABSTRACT

The outbreak of the corona virus, known as COVID-19, has had an impact both globally and locally. This paper provides an initial analysis in looking at the impact of COVID-19 for changing consumption patterns of the community, so that a space for discussion on the sociological side of consumption patterns is obtained, especially in the city of Palangka Raya.

Based on the results of observations and relevant reference support, this article provides a review that the impact of COVID-19 provides a change in people's consumption patterns in addition to meeting primary needs as well as meeting the needs for health, but in some parts there is no safety first pattern, in fact there is a lot of solidarity for affected communities.

**Keyword:** COVID-19, Masyarakat Konsumsi, Pola Konsumsi, Solidaritas Masyarakat

### PENDAHULUAN

Sejak merebaknya virus corona yang tercatat mulai pada akhir tahun 2019 di China tepatnya kota Wuhan, maka kemudian virus ini menjadi global dan menjangkiti hampir

seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Badan kesehatan dunia (WHO) pun sudah mengumumkan bahwa virus corona yang di sebut juga COVID-19 menjadi sebuah

ancaman global di seluruh dunia.

Merebaknya virus ini sangat membawa dampak terutama bagi perekonomian suatu bangsa (nasional) maupun global. Keadaan yang tidak terduga ini otomatis merevisi sebuah scenario yang disusun dalam memprediksi peningkatan ekonomi secara global. Dalam harian media online *kompas.com* tanggal 23 Maret 2020 dalam kolom JEO-Insight menyebutkan lembaga moneter internasional (IMF) pun menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global pun diprediksi melambat, sehingga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun ini, semenjak pukulan wabah corona. Padahal sebelumnya, pada Januari 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menguat, yaitu dari 2,9 persen pada 2019 menjadi 3,3 persen pada 2020.

China yang terdampak awal dari kasus wabah ini rupanya memberikan efek berantai ke negara lainnya, karena China pada tahun sebelumnya ikut memberikan dampak perekonomian secara global, sehingga wajar China menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat perkembangan ekonomi global.

Di Indonesia yang awalnya begitu optimis menyambut tahun 2020 dengan berbagai scenario peningkatan pertumbuhan ekonomi mulai merevisi target-target yang ada, karena jika sampai salah dalam menentukan kebijakan atau pun program maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kebangkrutan akibat dari merebaknya virus ini.

Dampak lain yang sangat perlu juga diperhatikan adalah dari sisi masyarakat (sosiologis) terutama di Indonesia dengan berbagai karakternya yang unik, kajian ini juga berusaha memberikan sebuah studi kasus yang ada di Kota Palangka Raya sehingga wacana pemikiran akan terus berkembang dan harapannya bisa memancing diskusi agar dapat memberikan sebuah konsep yang baik dalam menyikapi merebaknya virus ini.

## KERANGKA KONSEP

### 1. Beberapa Skenario dari Pemerintah

Jika dilihat lebih mendalam bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung dengan pemerintah, hal ini tidak lepas dari masih mayoritasnya masyarakat Indonesia yang dikategorikan menengah ke bawah. Pada sisi yang lain sisi kewirusahaan yang dijalani sebagai penopang usaha masyarakat masih berpola sederhana.

Maka kemudian, ketika bencana wabah global ini menerpa dunia pemerintah Indonesia dan BI (Bank Indonesia) melakukan beberapa skenario agar masyarakat bisa tetap aman dan bisa produktif kembali dalam menunjang perekonomian bangsa.

Berikut ini adalah petikan berita dari harian media online *kompas.com* tanggal 23 Maret 2020 dalam kolom JEO-Insight yang menyatakan scenario pemerintah Indonesia dalam menyikapi merebaknya COVID-19 ini :

*Skenario moderatnya, sebut dia, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 4 persen. Adapun skenario terburuknya, ekonomi bisa terperosok dengan pertumbuhan 2,5 persen bahkan 0 persen. "Beberapa minggu terakhir kami melihat skenario pertumbuhan ekonomi dari yang paling moderat, pengaruh covid-19 masih, ekonomi masih bisa tumbuh 4 persen," ujar dia ketika memberikan keterangan pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui video conference di Jakarta, Jumat. Skenario terburuk, ungkap dia, akan terjadi ketika wabah virus corona ini berkepanjangan apalagi bila sampai terjadi karantina wilayah (lockdown). "Jika durasi Covid-19 bisa lebih dari 3 sampai 6 bulan, kemudian **lockdown**, serta perdagangan internasional bisa drop di bawah 30 persen, penerbangan drop sampai dengan 75 persen hingga*

*100 persen, maka skenario bisa menjadi lebih dalam, pertumbuhan ekonomi bisa di kisaran 2,5 persen bahkan 0 persen,” papar Sri Mulyani.*

Lebih lanjut disebutkan bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani) pun masih belum bisa menyampaikan asumsi pasti pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Sebab, hingga saat ini masih terjadi dinamika yang berada di luar perhitungan pemerintah.

Sementara itu dalam bagian lain disebutkan bahwa BI memberikan semacam pedoman dengan memperhatikan dari aspek kemanusiaan dan ekonomi untuk mengatasi dampak kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha. beberapa langkah-langkah terkait dengan merebaknya COVID-19 ini, berikut ini yang bisa di rangkum dari media online *kontan.co.id* (Rabu, 25 Maret 2020) diantaranya :

1. Melakukan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dilakukan secara bersama dalam tataran global, sesuai kewenangan masing-masing negara
2. BI, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan koordinasi secara erat dari aspek stabilitas moneter, SSK, dan fiskal, dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19
3. Memperkuat stabilisasi di pasar valas, pasar keuangan, bersama Pemerintah dan OJK dalam penyediaan pembiayaan dari perbankan
4. Dalam sistem pembayaran, BI menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis, dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR 0% untuk QRIS dari Mei menjadi September 2020, yang disepakati bersama ASPI dan PJSP

Tampak bahwa dampak COVID-19 ini memang memberikan kepanikan dalam perekonomian Indonesia, hal ini memberikan

sebuah wacana baru bahwa wabah yang menjadi bencana global turut memberikan ketidakstabilan perekonomian dan dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dalam tataran ekonomi menengah ke bawah.

Misalnya jika dianalisis lagi pada poin ke 3 (tiga) bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembalian dana pinjaman dari bank, pada sisi yang lain kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mulai digulirkan dalam beberapa tahun belakangan, kondisi ini membuat pihak bank tentu merevisi cara pembayaran angsuran dan ini pun berpedoman dari kebijakan pemerintah melalui presiden Joko Widodo yang membijaksanai agar para pelaku usaha bisa menunda pembayaran hingga satu tahun kedepan dengan tetap membayar bunganya saja.

## 2. Masyarakat Konsumtif

Memahami konteks konsumtif dalam kajian sosiologis tidak lepas dari cakupan sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial dapat dimaknai adanya sesuatu yang dinamis dari yang telah usang (lama) ke arah yang baru. Bergantinya sesembahan dari kepala manusia dalam tradisi *kayau* suku Dayak ke kepala kerbau dapat dikatakan sebagai hal yang dinamis.

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa terjadi secara lambat (evolusi) atau secara cepat (revolusi) dengan melibatkan dimensi ruang dan waktu. Oleh Martono (2012)<sup>1</sup> memberikan pendapatnya bahwa untuk sisi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya, yang dalamnya mencakup sisi historis pada wilayah tersebut. Untuk kondisi waktu bisa melihat dari sisi masa lalu (*past*), sekarang (*present*), dan masa depan (*future*). Selain itu untuk memahami lebih lanjut dari perubahan sosial tidak lepas dari melihat sistem sosial yang ada terhadap perubahan yang terjadi, bisa saja dalam sebuah sistem hanya segelintir yang berubah tapi adakalanya bisa merubah semua

sistem sosial yang ada.

Perubahan sosial dalam kaitannya dengan masyarakat konsumtif jelas terlihat karena konsumerisme sebagai ideologinya akan beriringan dengan kapitalisme dan di topang dari sisi era global. Oleh Barker (2008)<sup>ii</sup> menyebutkan kapitalisme adalah suatu sistem dinamis ketika mekanisme yang didorong oleh laba mengarah pada revolusi yang terus berlanjut atas sarana produksi dan pembentukan pasar baru. Ada indikasi adanya ekspansi besar-besaran dalam kapasitas produksi kaum kapitalis. Pembagian kelas yang mendasar dalam kapitalisme adalah antara mereka yang menguasai sarana produksi, yaitu kelas borjuis, dengan mereka yang karena menjadi kelas proletar tanpa menguasai hak milik, harus menjual tenaga untuk bertahan hidup.

Tokoh kunci dalam memperkuat kajian ini adalah pemikiran dari sosiolog Perancis yaitu Jean Paul Baudrillard yang beraliran postmodern. Buku yang dikarangnya berjudul *The Consumer Society; Myths and Structures* memberikan banyak ulasan tentang masyarakat konsumtif yang di barengi oleh gejala konsumerisme yang sangat luar biasa dan telah menjadi bagian dari gaya hidup manusia modern.

Memahami makna konsumtif juga tidak lepas dari sisi makan kebutuhan yang didalamnya mengandung juga makna bahagia bagi masing-masing individu (masyarakat). Kebahagiaan yang dimaksud meliputi objek-objek dan tanda-tanda, dan bahkan kenyamanan yang pada ujungnya dapat ditunjukkan kepada lingkungan sekitar.

Ada sisi cela nya ketika semua ini dihadapkan pada kondisi masyarakat miskin versus masyarakat kaya dari kalangan elit. Ada sebuah atribut tambahan ketika hal itu melingkupi makna dari kebutuhan. Orang miskin memandang bahwa makan saja sudah cukup namun pada bagian yang lain dari kelompok kaya dan elit makan itu harus di

restoran dan berbagai macam hal lainnya. Inilah yang kemudian menandakan bahwa praktek konsumsi menyebabkan kesenjangan.

Ada sisi rasionalitas dalam memahami sistem masyarakat yang berakaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan akan bertribut dengan adanya tambahan hasrat. Inilah yang kemudian menjadikan banyak masyarakat menjadi “pembeli” simbol-simbol yang melekat pada objek. Sebagai contoh orang akan mudah membeli “merek” dibandingkn esensi atas sebuah kebutuhan. Membelanjakan seccangkir kopi menunjukkan siapa anda, ketika di sebuah café namun akan menjadi sebuah hal lain ketika siapa anda membelanjakan secangkir kopi di warung pinggir jalan. Maka kemudian yang terlihat adalah konsumsi awalnya dimaknai sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan pokok manusia, namun kemudian konsumsi dialihfungsikan sebagai sarana mengekspresikan posisi seseorang dan identitas kultural seseorang di dalam masyarakat. Ada sebuah makna-makna baru yang timbul ketika mengkonsumsi sebuah barang.

## PEMBAHASAN

### 1. Kondisi di Kota Palangka Raya

Ketika wabah COVID-19 mewabah perilaku konsumsi masyarakat menjadi berubah hal ini terlihat dari kebijakan Walikota Palangka Raya Nomor 188/282/HUK/2020 tentang ditetapkannya Kota Palangka Raya dalam status tanggap darurat bencana pandemic COVID-19, dengan melakukan penutupan sementara untuk Bar, Pub, Café, Diskotik, Bioskop, Objek Wisata, Rumah Biliar, Tempat Karaoke, Tempat Bermain Anak yang dimulai sejak 24 Maret 2020 hingga 04 April 2020. Dan juga menunda kegiatan MICE, Ballroom Hotel, Balai Pertemuan. Event Musik, Olahraga, Seni dan Budaya dan kegiatan sejenisnya.

Keadaan ini pun di tambah dengan anjuran yang betul-betul harus di perhatikan



adalah social distancing (menjaga jarak sosial) yang secara mudah difahami menghindari untuk berkumpul dengan banyak orang. Semua ini turut mempengaruhi pola konsumsi bagi masyarakat yang ada di Palangka Raya.

Selain itu juga keadaan tersebut membuat masyarakat mengutamakan membeli kebutuhan pokok sebagai hal yang utama. Di beberapa mini market seperti Indomaret ataupun Alfa Mart untuk membeli gula pasir dibatasi hanya boleh 2 kg, itu pun kadang tidak ada barangnya. Pasar pun mulai terindikasi sepi, pasar yang ada buka malam hari dengan jualan sayur mayur yang buka dari malam hingga pagi juga tidak seramai hari biasanya.

Kondisi ini juga diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumtif berdasarkan kajian pada bagian sebelumnya. Sehingga masyarakat kota Palangka Raya bisa dikatakan mengalami kerentanan dan akan diperkirakan menimbulkan banyak masalah sosial baru misalnya akan banyak pengemis, kriminal meningkat, dan berbagai macam penyakit sosial lainnya.

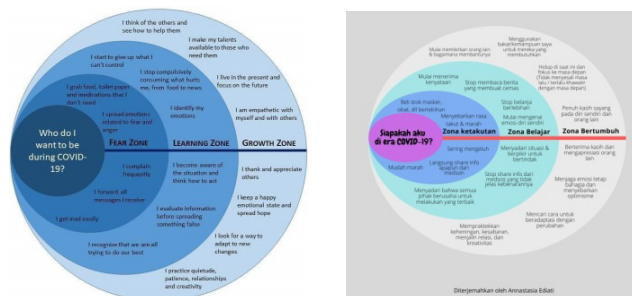
Namun ada hal yang juga menjadi kaitannya dengan makna konsumsi dan kebutuhan adalah ketika terjadi lonjakan pembelian untuk barang-barang yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19, misalnya pembelian alcohol dan bahan desinfektan, sabun, kemudian masker, vitamin hingga pemutih pakaian. Kesemua hal tersebut di pengaruhi oleh media yang gencar agar masyarakat memperkuat diri dan lingkungannya agar terhindar dari COVID-19.

Dari keadaan ini bisa menjadi sebuah gambaran adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di kota Palangka Raya telah terjadi, namun juga berpindah ke hal-hal yang sifatnya preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian yang bisa menjadi perhatian adalah orang-orang yang mengalami kerentanan dalam sisi mudah tertular adalah kaum miskin dengan kata lain mereka yang

karena keadaan tentu lebih memilih untuk tetap bekerja walaupun tanpa persiapan diri untuk mencegah terkena COVID-19. Bisa dipastikan alasan yang utama adalah demi pemenuhan kebutuhan hidup resiko apapun akan di tanggung.

Keadaan ini bisa dimaknai sebagai sebuah kepanikan, karena begitu luar biasanya pemberitaan dari berbagai media yang begitu massif ditambah lagi dengan tiadanya control yang cerdas dari penerima informasi tersebut, sehingga semakin membuat masyarakat menjadi semakin waspada.

Ada sebuah ilustrasi yang digambarkan di bawah ini mengenai kondisi kepanikan akibat wabah COVID-19, ilustrasi ini bisa menjadi sebuah penjelasan dari keadaan individu atau masyarakat dalam menyikapi wabah COVID-19.



Dalam ilustrasi yang diterjemahkan oleh Annastasia Ediaty diatas banyak beredar di media sosial baik itu *facebook*, *twitter*, ataupun group-group *WhatsApp*. Dari gambaran diatas ada 3 (tiga) zona yang membagi individu (bahkan kelompok masyarakat) dalam menyikapi wabah COVID-19, yang hingga kini di beberapa daerah masih dalam tahapan zona ketakutan, kemudian di kota besar mulai memasuki tahapan zona belajar dan bertumbuh.

## 2. Peran Pemerintah

Peran pemerintah turut memberikan penekanan atas pemberlakuan zona-zona tersebut, dan turut merubah pola konsumsi

masyarakat. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagaimana diberitakan oleh media online *Kompas.com* – pada tanggal 05 April 2020 bahwa PP tersebut kemudian ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam uraian Permenkes tersebut mencakup 6 (enam) hal :

1. Peliburan tempat sekolah dan tempat kerja ; Pengecualian peliburan sekolah berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kemudian pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan. Lalu, terkait dengan ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Pembatasan kegiatan keagamaan ; pembatasan dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum ; pembatasan dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Namun, pembatasan ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok. Selain itu, juga tidak berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya seperti olahraga.
4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan dilakukan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.
5. Pembatasan moda transportasi ; pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Selain itu, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Adanya pembatasan ruang gerak masyarakat dalam beraktifitas jelas sangat

mempunyai pengaruh bagi kalangan yang berusaha dengan mengharapkan pemasukan yang sifatnya harian. Bisa dibayangkan betapa *chaos* nya ketika aktivitas harian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pekerja bangunan, pengamen dan sebagainya ketika kebijakan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPSB) ini diberlakukan melebihi 14 (empat belas) hari. Dalam menyikapi keadaan tersebut beberapa kelompok masyarakat mencoba menggali solidaritas dengan membagikan sembako, peralatan kelengkapan kesehatan (masker, handsanitizer), buah-buahan dan berbagai bentuk dukungan lainnya.

Sasaran dari gerakan ini tidak hanya kepada petugas medis tapi yang terdampak seperti tukang becak, para pekerja yang di-PHK, buruh, dan semua yang terdampak. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitasnya misalnya *driver Go-Jek* dan *Grab* dilarang membawa penumpang namun untuk membawa barang tetap di perkenankan. Pola ini jelas membuat masyarakat mau tidak mau meng-*install* aplikasi dan mulai belajar dan memahami untuk belanja kebutuhan secara online dengan berbagai fitur-fiturnya.

Tinjauan perubahan sosial dalam konteks ini seolah-olah menjadi sangat dinamis. Dalam pandangan ini bisa dilihat dari konteks Talcott Parson agar manusia itu tidak punah dan harus stabil dalam menjaga kelangsungan hidup sistem sosialnya diperlukan 4 (empat) fungsi utama, oleh Mashud (2004) dalam Narwoko dan Suyanto (eds)<sup>iii</sup> keempat hal tersebut :

1. *Adaption to the environment – performed by the economy*. Dalam fungsi ini (adaptasi) berkaitan positif tentang teknologi dan tingkat kelangsungan serta kemandirian (otonomi). Ini menyangkut hubungan diantara masyarakat sebagai sistem sosial dan subsistem organisme tindakan serta dengan alam fisika-organik.
2. *Goal attainment – performed by the government*. Ada dimensi pemerintahan

pada fungsi kedua ini terutama yang berkenaan dengan pencapaian tujuan. Hal ini mengandung makna bagaimana pemerintah bisa mengorganisasikan sumber-sumber yang ada dalam hal ini subsistem kepribadian. Ada sebuah pertimbangan untuk mencapai tujuan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan berdasarkan atas segala sumber daya yang ada.

3. *Integration (linking the institution together) – performed by the legal and religion*. Dalam fungsi ketiga ini (integrasi) berkaitan dengan hal yang bersifat institusi non agama dan agama, dengan maksud bahwa berbagai institusi yang ada dalam sebuah sistem sosial bisa seimbang dan terkoordinasi dengan baik.
4. *Latency (pattern maintenance of values from generation to generation)-performed by the family and education*. Dalam fungsi yang keempat ini (pemeliharaan pola) berkenaan dengan keberfungsian dan berdayanya unsur-unsur yang ada dalam sistem sosial agar tidak berkembang menjadi tidak seimbang (*disequilibrium system*). Maka kemudian dalam fungsi ini erat kaitannya dengan sistem kultural yang sudah ada di dalam sistem sosial misalnya sistem kekerabatan dan pendidikan.

Kembali ke kondisi yang ada di kota Palangka Raya guna salah satu yang bisa dilihat bahwa untuk menstabilkan kondisi agar tetap seimbang dalam menyikapi wabah COVID-19 baru-baru ini dikeluarkan surat edaran dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah bernomor 800/722/DINSOS I dengan Perihal Permintaan Data Keluarga Miskin diluar Penerima Sembako, tanggal 03 April 2020. Dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kadis Sosial Se-Kalimantan Tengah bahwa untuk menyikapi wabah tersebut diperlukan data yang nantinya diberikan bantuan sembako kepada :

1. Keluarga miskin yang terdampak

- COVID-19 diluar yang mendapatkan Program Bantuan Sembako
2. Pekerja Rentan yang terdampak COVID-19 antara lain :
    - a. Pedagang Asongan
    - b. Pedagang Sayuran
    - c. Pedagang Buah
    - d. Pedagang Kaki Lima
    - e. Pedagang Gado-Gado Keliling
    - f. Pedagang Es Keliling
    - g. Penjual Gorengan
    - h. Kios Kecil
    - i. Tukang Sol Sepatu
    - j. Tukang Parkir
    - k. Tukang Jahit Emperan
    - l. Tukang Ojek/Ojek Online
    - m. Buruh Harian Lepas

Kriteria diatas nantinya akan diusulkan agar mendapat bantuan sembako dengan membuka hotline pendaftaran dan by email. Tindakan pemerintah sebagai institusi yang mempunyai kuasa diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan kategori diatas, paling tidak sampai keadaan normal dan masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa.

Solidaritas yang berusaha dibangun oleh institusi pemerintah melalui Dinas Sosial kepada masyarakat merupakan wujud tanggungjawab yang harus diambil, sebagai sebuah upaya agar menghindari kepanikan yang jika tidak diambil penanganannya bisa berakibat adanya *chaos*.

## PENUTUP

Wabah COVID-19 yang mengglobal telah banyak merenggut nyawa manusia dan hingga saat ini belum ditemukan vaksinnnya telah memberikan dampak bagi seluruh bidang kehidupan. Keadaan ini turut membuat pola konsumsi masyarakat berubah. Di Kota Palangka Raya pola konsumsi juga terlihat berubah karena semua hal yang berkaitan dengan sisi konsumtif berdasarkan pemikiran

Jean Paul Baudrillard telah digantikan dengan sebuah upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pada bagian lain turut meningkatnya pembelian bahan-bahan kimia yang berkaitan dengan upaya preventif untuk mencegah penularan COVID-19, pada bagian lain dampak wabah ini justru menguatkan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak. Pada bagian lain pemikiran Parson dengan AGIL-nya bisa memberikan sebuah tinjauan yang berbeda, biarpun dalam beberapa bahasan bahwa teori yang mengusung *genre* struktural fungsional ini mendapatkan banyak kritikan, sebagaimana pendapat Ritzer (2012)<sup>iv</sup> yang mengumpulkan beberapa pendapat kritik atas teori ini dalam hal dasar dengan melihat bahwa teori fungsional stratifikasi menyiratkan kekalnya posisi istimewa orang-orang yang mempunyai kekuasaan, prestise, dan uang. Selain itu juga semakin mengukuhkan bahwa orang-orang tersebut pantas mendapatkan penghargaan atas kebaikannya kepada masyarakat.

Sebagai sebuah kaitan dalam ranah keilmuan kajian ini bisa sebagai salah satu wadah untuk membuka diskusi yang nantinya akan memberikan pemahaman bersama ketika melihat sebuah kasus yang begitu global khususnya sejak merebaknya wabah COVID-19 ini. Pilihan-pilihan jawaban atas berbagai tinjauan yang ada dikembalikan kepada para pembaca sekalian.

- 
- i Martono, Nanang. Sosiologi Perubahan Sosial –Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. (Depok : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012).
  - ii Barker, Chris. Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage Publication, 2008
  - iii Suyanto, Bagong & Narwoko, Dwi J (editor). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
  - iv Ritzer, George. Teori Sosiologi – Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Eds. 8). (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)



**DAFTAR PUSTAKA**

- Barker, Chris. 2008. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial – Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Kota Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi – Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Eds. 8). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subandi. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong & Narwoko, Dwi J (editor). 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 188/282/HUK/2020 tentang ditetapkannya Kota Palangka Raya dalam status tanggap darurat bencana pandemic COVID-19.
- Surat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah bernomor 800/722/DINSOS I dengan Perihal Permintaan Data Keluarga Miskin diluar Penerima Sembako, tanggal 03 April 2020.

**Media Online :**

<https://jeo.kompas.com/bersiap-tameng-ekonomi-untuk-dampak-wabah-corona>

diakses 27 Maret 2020, Pukul 21.03 WIB

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-langkah-langkah-yang-dilakukan-bank-indonesia-dalam-menghadapi-virus-corona?page=1>, diakses 27 Maret 2020, pukul 21.36 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200407061330-37-150163/psbb-corona-berlaku-grab-gojek-cs-dilarang-bawa-penumpang/2>, diakses 7 April 2020, pukul 11.25 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbb-untuk-cegah-covid-19?page=all#page3>, diakses 7 April 2020, pukul 10.12 WIB

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)